

**EVALUASI KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
(BPP) DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK
(Studi Kasus BPP Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang)**

OLEH :

RINA RAHMADANI

04115008



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**EVALUASI KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK
(Studi Kasus : BPP Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengevaluasi kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam menerapkan pertanian organik , (2) Mengukur dan mengetahui keterlibatan penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluh terhadap pengembangan pertanian organik. (3) Mengidentifikasi permasalahan petani dan kebutuhan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan di BPP Ganting Kenagarian Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus dengan teknik pengambilan sampel secara sensus.

Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja BPP dalam pengembangan pertanian organik adalah baik dengan persentase (75,32 %). Ini dapat dilihat dari kegiatan organisasi yang dilakukan BPP dalam administrasi dan kesektarian, program penyuluhan dan pelaksanaan rapat anggota. Sedangkan keterlibatan penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluh terhadap pengembangan pertanian organik adalah tinggi (89,52 %). Ini terlihat dari tugas yang dilakukan oleh penyuluh yaitu mengunjungi petani, memberikan pelatihan, mengikuti SLPO, membuat pestisida nabati dan laporan pelaksana kegiatan pertanian organik. Dan untuk mengidentifikasi permasalahan petani dan kebutuhan penyuluhan pertanian, di dapat permasalahan yaitu minat petani rendah, tidak ada kepastian harga, pasar hasil pertanian organik tidak ada. Dimana permasalahan yang di hadapi petani belum bisa diatasi oleh penyuluh. Hal ini terjadi karena kegiatan penyuluhan yang di buat BPP dan penyuluh tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah petani.

Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan BPP dalam membuat program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat memecahkan masalah petani.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Departemen Pertanian telah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian yang sesuai dengan RPJM 2005 yaitu : (1) Program peningkatan ketahanan pangan, (2) Program pengembangan agribisnis, (3) Program peningkatan kesejahteraan petani. Guna mendorong pencapaian program tersebut maka pada tahun 2007 Departemen Pertanian menetapkan untuk memberikan prioritas terhadap pelaksanaan 28 kegiatan utama. Salah satu kegiatan tersebut adalah pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup (Departemen Pertanian, 2007).

Pengembangan pertanian organik dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Karena pengembangan pertanian organik dapat memaksimalkan pemakaian bahan-bahan yang ada disekitar petani dan menekan biaya usahatani. Pengembangan pertanian organik sangat disesuaikan dengan kondisi alam yang ramah lingkungan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 2007).

Untuk mewujudkan pengembangan pertanian organik yang maju perlu menyelenggarakan penyuluhan pertanian organik yang basisnya berada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). BPP adalah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada dikecamatan yang langsung berhadapan dengan proses pembelajaran petani mempunyai tugas : (1) Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota, (2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, (3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar, (4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, (5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, (6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2007).

Tugas pokok BPP adalah membantu dan melaksanakan keberhasilan program pembangunan pertanian dibidang sumberdaya manusia pertanian di wilayah kawasan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara teratur dan berkelanjutan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 2007).

BPP juga dapat berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis (KKA) yaitu sebagai sumber informasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih menguntungkan dan efisien. Dalam pengembangan kawasan agropolitan, BPP perlu diarahkan menjadi balai penyuluhan pembangunan terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluhan dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan agropolitan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 2007).

Dalam Undang-Undang Penyuluhan No.16 tahun 2006 dinyatakan perlunya adanya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, serta menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang ini merupakan satu titik awal dalam pemberdayaan para petani melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, swasta dan penyuluhan pertanian swadaya.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pelimpahan wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah ternyata penyuluh pertanian mengalami beberapa kendala. Menurut Mawardi (2004), salah satu kendala yang dihadapi penyuluh pertanian di era otonomi daerah adalah ketersediaan dan dukungan informasi pertanian yang ada di BPP sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Sehingga merosotnya penghargaan dan kepercayaan petani dan masyarakat sekitar terhadap penyuluh dan kegiatan penyuluhan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah merumuskan salah satu kebijakan penyuluhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2006 adalah Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan. Dimana arah kebijakan pembangunan pertanian adalah penguatan dan penumbuhan lembaga petani serta penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian, perikanan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Kinerja BPP dalam menerapkan pertanian organik adalah baik (75,32%). Ini dapat dilihat dari adanya kegiatan organisasi dan penerapan pertanian organik yang dilaksanakan oleh BPP. Tetapi masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan pertanian organik yaitu pasar organik belum tersedia tersedia dan pengurusan sertifikasi organik harus jelas.
2. Keterlibatan penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluh terhadap pengembangan pertanian organik adalah tinggi (89,52 %). Karena setiap penyuluh sangat antusias dan mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan kegiatan pengembangan pertanian organik baik dalam hal mengunjungi petani, memberikan latihan dan informasi, Sekolah Lapang pertanian Organik, pembuatan pestisida nabati serta kerja sama yang baik antara sesama penyuluh. Namun kenyataannya dilapangan walaupun kegiatan penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya terhadap pengembangan pertanian organik tinggi ternyata kegiatan penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan petani dan belum dapat mengatasi pemecahkan masalah petani yang berkaitan dengan pertanian organik.
3. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BPP dan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya terhadap pengembangan pertanian organik belum sesuai dengan kebutuhan petani. Ini dapat dilihat dari masih terdapat masalah yang dialami petani belum dapat diatasi seperti minat petani terhadap pertanian organik rendah, jumlah produksinya rendah, tidak tersedianya pasar dan tidak adanya kepastian harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2003. *Keunggulan Sumberdaya Kota Padang Panjang*. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Padang Panjang Timur Dalam Angka 2007*. Padang Panjang.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Padang Panjang Dalam Angka 2008*. Padang Panjang.
- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2007. *UU No.16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Ban, A.W Van Den dan Hawkins. 1999. *Penyuluh Pertanian*. Kanisius. Jogjakarta
- Cahyono, Bambang Tri. 1983. *Kebijakan Pertanian*. Yogyakarta. UGM. 114 hal.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan.2008. *Pedoman Umum Produksi Pertanian Organik*. Jakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .2007. *Pedoman Standar Minimal BPP Model di Sumatera Barat*. Sumatera Barat.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2009. *Buku Data Informasi Kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2008*. Padang Panjang.
- Satyagraha, Haris. 2008. *Evaluasi Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Banda Kilangan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kab. Tanah Datar*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Unversitas Andalas.
- Helmi, dkk. 1998. *Penyesuaian Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Pemberdayaan Petani*. PS-SDALP Unand. Padang.
- Kartasapoetra. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kartonegoro, Sentoso. 1994. *Manajemen Organisasi*. Widyapres. Jakarta.
- Made I, Wirartha. 2006. *Metodologi Sosiologi Ekonomi* . Andi .Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok. 1999. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mawardi, Sulton. 2004. *Persoalan Penyuluhan di Era Otonomi Daerah*. SMERU
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.